



**Judul** : Rapat dengan BUMN pertambangan, Komisi VI soroti kelakuan pengusaha smelter asing  
**Tanggal** : Rabu, 30 September 2020  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Rapat Dengan BUMN Pertambangan **Komisi VI Soroti Kelakuan Pengusaha Smelter Asing**

**Senayan mempersoalkan industri hilirisasi nikel yang banyak dikuasai asing. Mereka dengan leluasa membeli nikel dengan harga murah, jauh di bawah harga patokan pemerintah. BUMN Pertambangan Nasional yang digawangi Mind ID diminta segera melakukan penyelamatan.**

ANGGOTA Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja bersama Holding BUMN Pertambangan, PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Sucifindo (Persero) di gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

"Untuk PT Antam (Persero), saya mendengar ada keluhan dari asosiasi pengusaha nikel kita sampai sekarang harga patokan mineral (nikel) yang dijanjikan pemerintah masih angan-angan," kata Andre.

Padahal, sambung Andre, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) telah

mengeluarkan peraturan menteri mengenai patokan pembelian harga mineral nikel dalam negeri.

Andre memberi contoh, perusahaan-perusahaan *smelter* asal China yang ada di Marowali (Sulsel) dan tempat lainnya hanya mau membeli dengan harga sangat murah.

"Pengusaha nikel lokal kita masih dizalimi dengan harga rendah. Harga yang tidak manusiawi oleh *smelter-smelter* China yang di Marowali, itu yang menurut saya hanya menguntungkan mereka," katanya.

Politisi Gerindra ini menilai,

investor itu berupaya mengeruk sumber-daya alam negara ini lalu membelinya dengan harga murah. Ironisnya, pemerintah malah memfasilitasi para pengusaha asal China ini untuk memperkaya diri.

"*Smelter* China di Indonesia tapi tidak menguntungkan kita. Saya berharap Mind ID, PT Antam, menjalin hubungan dengan pengusaha-pengusaha lokal," katanya.

Andre telah mendengar bahwa Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini ke Korea Selatan untuk mempersiapkan bisnis hilirisasi nikel ini membangun industri baterai dan berbagai industri lainnya.

Dia berharap, bisnis hilirisasi ini bisa direalisasikan melalui BUMN dengan menggandeng para pengusaha-pengusaha nikel. Dengan demikian, para pengusaha nikel lokal tidak lagi jual nikel ke pengusaha-pengusaha *smelter* China dengan

harga murah.

Dia pun berharap, tidak ada perlakuan istimewa ke para pengusaha-pengusaha *smelter* China ini. Bukan sebaliknya, tidak tersentuh. Di saat pemerintah telah menetapkan harga patokan nikel, tapi mereka semauanya membeli sumber daya alam yang telah dikeruk dari perut bumi Indonesia ini dengan harga sesuka mereka.

"Saya harapkan Pak Dirut Antam dengan Kementerian BUMN, proyek hilirisasi ini jadi penyelamat sumber daya alam kita. Daripada *smelter* China menikmati lebih baik Antam bersama seluruh BUMN bekerja sama bangun *smelter*, bangun industri hilirisasi dan kita Komisi VI semua mendukung," tambah dia.

Sementara, Direktur Utama PT Antam Tbk Dana Amin menuturkan, memang salah satu persoalan yang membuat PT Antam terkendala membangun

*smelter* adalah kondisi keuangan yang cukup berat, di mana utang yang dimiliki perusahaan sampai saat ini tercatat Rp 9 triliun, sementara aset sebesar Rp 30 triliun.

Di satu sisi, komoditi yang digarap Antam ini termasuk komoditi yang marketnya sangat fluktuatif.

"Contoh kita kerja 6 bulan hasilnya Rp 85 miliar. Tapi begitu market membaik sejak Juli-Agustus, kita sudah 10 kali dari kerja 6 bulan. Jadi memang sangat rentan dengan komoditi market," katanya.

Selain itu, situasi di PT Antam juga sudah lama vakum dalam investasi *smelter*. Kondisi ini pula yang membuat Antam ketinggalan dari *smelter* asal China.

"Saya kira ini jadi cambuk dan motivasi bagi Antam secara cepat mengembangkan industri hilirisasinya," ujar Dana. ■ KAL